

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan ekonomi merupakan hal yang menarik dikarenakan terdiri dari berbagai dinamika secara mikro ataupun makro. Pembangunan sering mengakibatkan dampak positif atau negative oleh karena itu dibutuhkan suatu indikator yang digunakan untuk tolak ukur dalam pembangunan. Negara dikatakan sukses jika dalam pembanguan ekonominya dapat mengatasi tiga masalah yang ada dalam pembangunan. Masalah tersebut yaitu adanya jumlah kemiskinan yang terus mengalami peningkatan, adanya pendistribusian pendapatan yang memburuk, dan tidak variativnya lapangan pekerjaan yang dapat mengakibatkan tidak mampu menyerap para pencari kerja (Kuncoro,2010).

Bank dunia merupakan organisasi dunia yang bertujuan untuk pengentasan masalah kemiskinan mempunyai impian untuk mewujudkan dunia tanpa adanya kemiskinan. United Nation Developmen Program (UNDP) menjadikan progam pengurangan kemiskinan sebagai tujuan pertama dalam programnya (Fereira, 2011).

Kemiskinan adalah keadaan dimana saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan tersebut bisa disebabkan oleh adanya kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Hal ini tercermin dalam firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum, 30:38, sebagai berikut:

فَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ ۗ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahannya:

“Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung”.

Sebagaimana yang tertera dalam QS. Az-Zukhruf, 43:32, sebagai berikut:

أَمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِي أَوْ رَحْمَةً رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Terjemahannya:

“Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain berberapa derajat, agar sebagian mereka memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.

Menurut Bappenas (2004), menjelaskan bahwa yang di maksud dengan kemiskinan merupakan keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang tidak bisa untuk memenuhi hak dasarnya untuk mengembangkan dan mempertahankan kehidupannya yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut antara lain seperti tercukupinya akan kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman, lingkungan, sumber daya alam dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan baik sosial maupun politik. Kemiskinan juga dapat terjadi karena kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar atau sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan sehingga kemiskinan juga menjadi masalah global.

Menurut Arsyad (2010), menjelaskan bahwa kemiskinan yang terjadi di negara Indonesia bersifat multidimensi. Maksud dari multidimensi yaitu adanya beberapa aspek baik itu aspek primer maupun aspek sekunder. Pengertian aspek primer meliputi miskin aset, organisasi sosial politik, keterampilan dan juga pengetahuan yang kurang, sedangkan pengertian aspek sekunder yaitu adanya miskin jaringan sosial, sumber keuangan dan juga informasi

Persoalan kemiskinan merupakan masalah kompleks sebab bukan hanya berhubungan dengan persoalan rendahnya tingkat konsumsi dan pendapatan saja namun juga dengan rendahnya tingkat kesehatan, pendidikan dan ketidakberdaya untuk berikutsertaan dalam suatu pembangunan berbagai masalah yang berkaitan dengan pembangunan manusia (Wijiyanti, 2005).

TABEL 1. 1**Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) Provinsi Se-Jawa dan Nasional**

Provinsi	Thn. 2014	Thn. 2015	Thn. 2016	Thn. 2017	Thn. 2018	Maret 2019
Jawa Timur	4.748,42	4.775,97	4.638,53	4.405,27	4.292,15	4.112,25
DKI Jakarta	412,79	368,67	385,84	393,13	372,26	365,56
Jawa Barat	4.238,96	4.485,66	4.168,11	3.774,41	3.539,40	3.399,16
Jawa Tengah	4.561,83	4.505,78	4.493,75	4.197,49	3.867,42	3.743,23
DI Yogyakarta	532,59	485,56	488,83	466,33	450,25	448,47
Banten	649,19	690,66	657,74	699,83	668,74	654,46
Nasional	27.727,78	28.513,60	27.764,32	26.582,99	25.674,58	25.144,72

Sumber: Badan Pusat Statistik RI

Tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Se-Jawa dengan jumlah penduduk miskin yang paling banyak yaitu berada di Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2019 penduduk miskin terbanyak berada di Provinsi Jawa Timur dengan jumlah 4.112,25 ribu jiwa, sedangkan urutan kedua dengan jumlah penduduk miskin terbanyak berada di Provinsi Jawa Tengah sebesar 3.743,23 ribu jiwa dan urutab ketiga dengan jumlah penduduk miskin terbanyak yaitu Provinsi Jawa Barat sebesar 3.399,16 jiwa.

Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur yaitu jumlah penduduk. Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penduduk yaitu semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.

TABEL 1. 2**Jumlah Penduduk di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019**

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Pertumbuhan (%)
2014	38 610 202	0,64

2015	38 847 561	0,61
2016	39 075 152	0,58
2017	39 292 971	0,56
2018	39 500 851	0,53
2019	39 698 631	0,50

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

Tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa setiap tahun jumlah penduduk di Provinsi Jawa Timur meningkat. Pada tahun 2014 jumlah penduduk berjumlah 38 610 202 jiwa kemudian ditahun selanjutnya 2015 terjadi peningkatan menjadi 38 847 561 jiwa penduduk , adanya peningkatan jumlah penduduk terjadi juga pada tahun selanjutnya, pada tahun 2016 jumlah penduduk di Provinsi Jawa Timur meningkat menjadi 39 075 152 jiwa begitu juga ditahun 2017 jumlah penduduk meningkat menjadi 39 292 971 jiwa, sedangkan pada tahun 2018 jumlah penduduk juga meningkat menjadi 39 500 851 jiwa dan tahun 2019 terjadi peningkatan yang cukup signifikan menjadi 39 698 631 jiwa.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan. PDRB yaitu nilai bersih barang dan jasa – jasa akhir yang dihasilkan dalam berbagai kegiatan ekonomi pada suatu daerah dalam suatu periode. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa PDRB yang semakin meningkat disuatu wilayah maka semakin besar potensi pendapatan di daerah tersebut (Hapsoro, 2013).

TABEL 1. 3

PDRB ADHK (Miliar Rupiah) Provinsi Jawa Timur

Tahun	PDRB (Miliar Rupiah)	Pertumbuhan (%)
2014	1 262 684.50	5,86
2015	1 331 376.10	5,44
2016	1 405 563.51	5,57
2017	1 482 299.58	5,46
2018	1 563 769.10	5,50
2019	1 650 143.15	5,52

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur

Tabel 1.3 diatas, menunjukkan bahwa PDRB atas dasar harga konstan di Provinsi Jawa Timur dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, pada tahun 2014 sebesar 1 262 684.50 miliar rupiah, sedangkan pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 1 650 143.15 miliar rupiah. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bintang, A. B. M., & Woyanti, N. (2018) bahwa PRDB berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, artinya bahwa pertumbuhan ekonomi tidak merata dan didominasi oleh kontribusi masyarakat golongan berpendapatan tinggi sehingga pertumbuhan ekonomi tidak diikuti dengan pemerataan akan menyebabkan ketimpangan ekonomi pada suatu daerah.

Upah minimum juga merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan. Upah minimum yaitu suatu usaha untuk mengangkat derajat penduduk yang berpendapatan rendah terutama untuk masyarakat yang miskin. Tingkat upah minimum yang meningkat juga mengakibatkan peningkatan pendapatan masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat akan terjamin dan terbebas dari kemiskinan.

Upah minimum yang terdapat pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 7 tahun 2013 menjelaskan mengenai upah bulan terendah yang meliputi atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang telah ditetapkan gubernur. Adanya upah yang rendah dapat disebabkan oleh perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia.

TABEL 1. 4

Upah Minimum (UMP) per Bulan Tahun 2017-2019

Tahun	Upah Minimum Provinsi (Rupiah)	Pertumbuhan (%)
2017	1 388 000	8,25
2018	1 508 895	8,7
2019	1 630 059	8,3

Sumber: BPS, Statistik Indonesia

Tabel 1.4 diatas menunjukkan bahwa upah minimum provinsi di Jawa Timur dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 upah minimum provinsi di Jawa Timur sebesar 1 388 000 rupiah, dan pada tahun 2018 upah minimum provinsi Jawa Timur naik menjadi 1 508 895 rupiah. Pada tahun 2019 upah minimum provinsi di Jawa Timur juga mengalami kenaikan menjadi 1 630 059 rupiah.

IPM merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan. IPM mempengaruhi kondisi perekonomian dan jika tidak diatasi dengan baik dapat menimbulkan tingkat kemiskinan diberbagai daerah. IPM juga menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

TABEL 1. 5

IPM di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

Tahun	IPM	Pertumbuhan (%)
2014	68,14	0,88
2015	68,95	1,19
2016	69,74	1,15
2017	70,27	0,75
2018	70,77	0,72
2019	71,50	1,03

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur

Tabel 1.5 diatas menjelaskan bahwa IPM di Provinsi Jawa Timur dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Pada tahun 2014 IPM di Provinsi Jawa Timur sebesar 68,14 persen, sedangkan pada tahun 2015 mengalami kenaikan menjadi 68,95 persen. Tahun 2016 sampai 2019 IPM di Provinsi Jawa Timur juga cenderung mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2016 sebesar 69,74 persen, tahun 2017 sebesar 70,27 persen, tahun 2018 sebesar 70,77 persen dan di tahun 2019 sebesar 71,50 persen.

Penanggulangan kemiskinan sebenarnya telah dilakukan oleh pemerintah yaitu meliputi adanya inpres pada desa yang masih tertinggal (IDT). Adanya program kopensasi pengalihan subsidi BBM dan lainnya. Akan tetapi apa yang dilakukan tersebut hanya bersifat jangka pendek dan tidak memberikan pelatihan keterampilan yang memiliki sifat ke berkelanjutan. Oleh karena itu harapanya dalam program yang telah dilakukan oleh pemerintah harusnya bersifat jangka panjang sehingga dapat meggentaskan kemiskinan yang ada (Rahman, 2010).

Faktanya dengan jumlah penduduk miskin yang masih banyak di negara Indonesia menunjukkan jika pemerintah masih belum berhasil dalam pengentasan tingkat kemiskinan. Tingkat angka kemiskinan di Jawa Timur bisa terjadi diakibatkan oleh pengaruh berberapa faktor yaitu pertumbuhan ekonomi dan pengangguran. Todaro, (2003) pengangguran mempunyai hubungan erat dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan. Standar hidup rendah dimanifestasikan baik secara kualitatif dan kuantitatif dalam bentuk tingkat pendapatan yang sangat rendah, perumahan yang kurang layak, kesehatan yang buruk, pendidikan yang minim, angka kematian bayi yang tinggi, usia harapan hidup yang rendah dan peluang untuk memperoleh kerja yang rendah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Azizah, E. W., Sudarti, S., & Kusuma, H. (2018) dengan judul “Pengaruh Pendidikan, Pendapatan Perkapita Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2016”. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pendidikan berpengaruh negative dan signifikan terhadap kemiskinan, variabel pendapatan perkapita berpengaruh negative dan signifikan terhadap kemiskinan, variabel jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Penelitian yang dilakukan memiliki persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan penelitian yaitu menggunakan jumlah penduduk, studi kasus yang sama di Provinsi

Jawa Timur dan juga menggunakan analisis regresi data panel. Perbedaannya ialah variabel pendidikan, pendapatan perkapita sedangkan peneliti menggunakan variabel PDRB, UMK, IPM dan menggunakan tahun 2014 – 2019.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bintang, A. B. M., & Woyanti, N. (2018) dengan judul “Pengaruh PDRB, Pendidikan, Kesehatan, Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Jawa Tengah (2011-2015)”. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel PDRB berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan, variabel pendidikan berpengaruh negative terhadap tingkat kemiskinan, dan variabel kesehatan berpengaruh negative terhadap tingkat kemiskinan, dan juga variabel pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian yang dilakukan memiliki persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan penelitian yaitu menggunakan variabel PDRB dan menggunakan regresi data panel. Perbedaannya ialah variabel pendidikan, kesehatan dan studi kasus di Jawa Tengah sedangkan peneliti menggunakan variabel jumlah penduduk, UMK, dan IPM dan juga studi kasus di Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sari, R. L., & Khoirudin, R. (2019) dengan judul “Determinan Tingkat Kemiskinan Di Pulau Madura”. Teknik analisis data menggunakan analisis data regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, variabel IPM berpengaruh negative dan signifikan terhadap kemiskinan dan variabel PDRB berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap kemiskinan dan juga variabel upah minimum berpengaruh negative dan signifikan terhadap kemiskinan. Penelitian yang dilakukan memiliki persamaan dan perbedaannya. Adapun persamaan penelitian yaitu menggunakan variabel PDRB, IPM, dan upah minimum.

Perbedaannya ialah teknik analisis data linear berganda dan juga studi kasus di Pulau Madura, sedangkan peneliti menggunakan analisis data panel dan studi kasus di Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hatta, M., & Aziz, A. (2017) dengan judul “Analisis Faktor Determinan Tingkat Kemiskinan di Indonesia Periode 2005-2015”. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi berganda dengan OLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan, variabel IPM berpengaruh negative terhadap tingkat kemiskinan, variabel inflasi berpengaruh negative namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan, dan variabel gini ratio berpengaruh negative terhadap tingkat kemiskinan, dan juga variabel dependensi ratio berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian yang dilakukan memiliki persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan penelitian yaitu menggunakan variabel IPM. Perbedaan terletak pada teknik analisis data regresi berganda dengan OLS dan studi kasus di Indonesia, sedangkan peneliti menggunakan analisis data panel dan studi kasus di Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, UMK dan IPM terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019”.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan peneliti terdapat batasan- batasan permasalahan yang diberikan oleh penulis mengingat adanya keterbatasan kemampuan sumber daya peneliti dan luasnya permasalahan, maka adanya batasan penelitian agar mudah dimengerti dan tidak menyimpang dari tujuan penulisan. Berikut berberapa batasan masalah peneliti:

1. Variabel-variabel yang diduga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur yaitu Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum Kabupaten/kota, dan IPM.
2. Data yang digunakan adalah data dari tahun 2014 sampai dengan 2019 yaitu terdiri dari:
 - a. Tingkat Kemiskinan
 - b. Jumlah Penduduk
 - c. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
 - d. Upah Minimum Kabupaten/kota
 - e. Indek Pembangunan Manusia

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah di bahas di atas, dalam penelitian ini akan ada beberapa konteks pembahasan guna memfokuskan masalah yang akan dijelaskan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2014 – 2019?
2. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2014 – 2019?
3. Bagaimana pengaruh UMK terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2014 – 2019?
4. Bagaimana pengaruh IPM terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2014 – 2019?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2014 – 2019.
2. Untuk menganalisis pengaruh PDRB terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2014 – 2019.
3. Untuk menganalisis pengaruh UMK terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2014 – 2019.
4. Untuk menganalisis pengaruh IPM terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2014 – 2019.

E. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Ilmiah
 - a. Bagi penulis penelitian ini digunakan sebagai media untuk mengembangkan diri dan juga untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama dibangku kuliah pada program S1 jurusan Ilmu Ekonomi.
 - b. Bagi akademisi penelitian ini bisa menambah wawasan untuk para akademisi yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur dan diharapkan juga bisa memberikan tambahan referensi bagi mahasiswa sebagai bahan penelitian selanjutnya yang sejenis.
2. Manfaat Praktik

- a. Bagi masyarakat/pembaca yang mana penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya ilmu ekonomi.
- b. Bagi pengambil kebijakan diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi baru bagi para pengambil kebijakan dalam memahami masalah dari faktor – faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur dan daerah lainnya sehingga dapat diketahui faktor – faktor yang perlu di pacu untuk mengatasi masalah kemiskinan yang ada.